

ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Miranda Akmalia Agustina

STAIN Bengkalis,

Indonesia

E-mail:

miranda.akmalia482@gmail.com

Bambang Irawan

STAIN BENGKALIS

irawan1@hotmail.com

Received: Agustus, 2024

1st Revision: Agustus, 2024

Accepted: Agustus, 2024

ABSTRACT. Penelitian ini menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, mengidentifikasi hambatan dalam penerapan SAP, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangan, namun masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas standar akuntansi, dan sistem informasi yang tidak memadai. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, seperti meningkatkan kompetensi staf, memperbarui sistem informasi, dan memperkuat koordinasi antar unit kerja.

Keywords: Akuntansi Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Laporan Keuangan, Kualitas Laporan Keuangan

1. Pendahuluan

Perkembangan akuntansi untuk sektor publik, khususnya di Indonesia, semakin cepat. Hal ini terjadi karena adanya perubahan-perubahan besar dalam cara pemerintah menjalankan kebijakannya, serta adanya desentralisasi fiskal, yang berarti pemerintah pusat memberikan lebih banyak kekuasaan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan menggunakan uang mereka.

Selain itu, karena adanya globalisasi, setiap negara, termasuk pemerintah daerah di Indonesia, dituntut untuk bisa bersaing. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk mandiri, yang bisa dicapai dengan memberikan mereka otonomi, atau kebebasan untuk mengatur dan mengelola sendiri uang mereka.¹

Dengan adanya otonomi ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola uang mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan sistem akuntansi yang baik untuk memastikan bahwa uang tersebut digunakan dengan cara yang efektif dan efisien, dan bisa dipertanggungjawabkan.

¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Mengingat luasnya kewenangan dalam pemerintahan, di masa depan pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari pada saat ini. Kemampuan tersebut mencakup berbagai hal, seperti kemampuan dalam pemerintahan, kelembagaan, personel, keuangan, dan peralatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya fokus pada pengembangan kelembagaan mereka agar dapat memainkan peran yang lebih besar secara efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini penting agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, serta mengelola sumber daya yang mereka miliki dengan efisien dan bertanggung jawab.

Dengan mengembangkan kelembagaan mereka, pemerintah daerah dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi tuntutan dan tantangan yang ada di masa depan. Dengan begitu, mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan lebih baik dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan menjadi semakin penting terutama dalam organisasi publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Akuntabilitas, atau tanggung jawab untuk berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan organisasi, menjadi semakin penting. Salah satu cara untuk menunjukkan akuntabilitas ini adalah melalui laporan keuangan. Laporan keuangan adalah cara organisasi, seperti pemerintah menunjukkan bagaimana mereka telah menggunakan dana mereka. Laporan ini harus dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAiP) merupakan pedoman pemerintah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan ini, menggunakan Basis Cash Toward Accrual (Kias Menuju Akrua), dimana Laporan Realisasi Anggaran yang berisi pendapatan dan belanja disajikan dengan basis kas, sedangkan laporan neraca yang berisi aset, ekuitas dan dana kewajiban disusun dengan menggunakan basis akrual.²

Akuntansi Berbasis Akrua adalah metode akuntansi dimana transaksi dan peristiwa lainnya dicatat saat mereka terjadi, bukan saat uangnya masuk atau keluar. Jadi, jika Anda menjual sesuatu pada bulan Januari tetapi tidak dibayar sampai bulan Februari, dalam akuntansi berbasis akrual, penjualan tersebut akan dicatat pada bulan Januari. Fokus dari metode ini adalah untuk mengukur sumber daya ekonomi dan bagaimana sumber daya tersebut berubah. Jadi, bukannya hanya melihat uang yang masuk dan keluar, metode ini melihat bagaimana aset dan kewajiban perusahaan berubah seiring waktu. Akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang keuangan perusahaan, karena mencakup lebih banyak informasi tentang aset dan kewajiban.³

Hasil yang menarik juga terkait permasalahan mengenai penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amelia Ahmad dan Sulaiman yang relevan dan dijadikan sebagai pembandingan dengan penelitian ini adalah dengan judul "Analisis Penerapan Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende", dengan hasil penelitian bahwa upaya bahwa Penerapan Akuntansi Dalam Penyusunan Akuntansi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende sesuai/sejalan dengan PP 71 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Hasil ini didukung dengan adanya peraturan pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah Kabupaten Ende khususnya Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende untuk menerapkan PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

² Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

³ Heitner, Heather. "Accrual Accounting: What It Is and How It Works." *Investopedia*, 11 Jan. 2023, www.investopedia.com/terms/a/accrualaccounting.asp.

(SAiP). Pendapat Amelia Ahmad dan Sulaiman agar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dengan tetap memberikan sosialisasi disertai pelatihan secara berkala kepada SDM dan menambah jumlah SDM terutama yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi khususnya akuntansi pemerintah agar penerapan akuntansi PP 71 tahun 2010 dapat berjalan optimal. Perbedaan penelitian yang dilakukan Amelia Ahmad dan Sulaiman dengan penelitian ini adalah penelitian Amelia Ahmad dan Sulaiman mengacu pada Standar Akuntansi mengetahui tingkat pemahaman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan sedangkan penelitian ini yang akan dilakukan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan proses penyusunan laporan keuangan tersebut dan bagaimana penerapannya dalam perspektif syari'ah. Selain itu, juga dapat mempertimbangkan bagaimana implementasi PP Nomor 71 Tahun 2010.⁴

2. Telaah Pustaka

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. SAP bertujuan untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan, termasuk legislatif, dan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Auditor eksternal (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit⁵.

- a. Pengertian akuntansi pemerintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan.
- b. Penyusunan dan penetapan standar akuntansi pemerintah melibatkan berbagai langkah dan proses untuk memastikan bahwa standar tersebut relevan, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan entitas pemerintah. Fenomena yang terjadi di sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun di daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Tahapan Penyiapan SAP:

- a) Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar
- b) Pembentukan kelompok kerja (Pokja) di dalam KSAP
- c) Riset terbatas oleh kelompok kerja
- d) Penulisan draf SAP oleh kelompok kerja
- e) Pembahasan draf oleh komite kerja
- f) Pengambilan keputusan draf untuk dipublikasikan
- g) Peluncuran draf publikasi SAP (*Exposure Draft*)
- h) Dengari pendapat terbatas (*Limited Hearing*) dan dengari pendapat publik (*Public Hearings*)
- i) Pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draf publikasi

⁴ Amelia Ahmad dan Sulaiman, "Analisis Penerapan Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, 2018, pp. 1-15.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

j) Finalisasi Standar

SAP merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. SAP dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara pengguna, penyusun, dan auditor. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.⁶

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia. Dalam mengelola dana-dana masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, transparansi dan akuntabilitas publik menjadi tuntutan yang penting. Oleh karena itu, penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan menjadi sangat diperlukan.

Perkembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia sebelumnya, Indonesia telah mengalami banyak perkembangan dalam pengembangan akuntansi pemerintah. Penggunaan basis kas, pendekatan single fund, dan pencatatan transaksi keuangan dengan metode pendekatan tunggal (*single entry*) merupakan ciri khas perkembangan akuntansi pemerintah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur tentang pengelolaan keuangan negara, termasuk pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengadopsi Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Akuntansi pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara. Di samping itu, bidang ini meliputi pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan UU yang berlaku.⁷

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas atau organisasi dalam periode tertentu. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, serta perubahan ekuitas entitas tersebut.⁸

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan memberikan gambaran tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, serta perubahan ekuitas suatu entitas dalam periode tertentu.

Tujuan utama laporan keuangan menurut SAP menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Jenis Laporan Keuangan: Laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

- a) Neraca (*Balance Sheet*) menyajikan informasi tentang posisi keuangan suatu entitas pada suatu tanggal tertentu⁹. Neraca mencakup aset (harta), kewajiban (utang), dan ekuitas (modal) entitas tersebut.

⁶ Sinta Putri Utami, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Sebagai Badan Layanan Umum Daerah," (Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2019)

⁷ Nordiawan, Deddi, dkk. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat. 2008.

⁸ Wastam Wahyu Hidayat, *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018)

⁹ Munawir S. 2004. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Keempat, Cetakan Kesebelas. Yogyakarta : Penerbit Liberty hlm13

- b) Laporan Laba Rugi (*Income Statement*) menyajikan informasi tentang kinerja keuangan suatu entitas dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. Laporan ini mencatat pendapatan, biaya, laba, dan rugi entitas tersebut.
- c) Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*) menyajikan informasi tentang arus masuk dan keluar kas suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan ini mencatat aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan entitas tersebut.
- d) Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement of Changes in Equity*) menyajikan informasi tentang perubahan dalam ekuitas suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan ini mencatat investasi pemilik, laba yang ditahan, dividen, serta perubahan lain dalam ekuitas entitas tersebut.

Persamaan Dasar Akuntansi

Persamaan dasar akuntansi adalah prinsip fundamental dalam akuntansi yang menjelaskan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik¹⁰. Persamaan ini adalah dasar dari sistem pencatatan ganda dan mencerminkan struktur laporan keuangan.

Bentuk Persamaan Dasar Akuntansi:

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas Pemilik}$$

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah dokumen yang berisi informasi dan rangkuman mengenai kondisi keuangan suatu entitas bisnis atau organisasi pada periode tertentu. Laporan keuangan dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan entitas tersebut kepada para pemangku kepentingan, seperti pemilik, investor, kreditor, dan pihak terkait lainnya. Komponen Utama Laporan Keuangan:

- a) Laporan Laba Rugi merupakan ringkasan dari pendapatan dan biaya entitas selama periode tertentu, yang menggambarkan apakah entitas tersebut menghasilkan keuntungan atau mengalami kerugian.
- b) Neraca Keuangan menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas entitas pada titik tertentu, yang memberikan gambaran mengenai posisi keuangan entitas tersebut.
- c) Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai arus masuk dan keluar uang tunai selama periode tertentu, yang memberikan gambaran tentang kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan mengelola arus kasnya.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki¹¹:

- a) Relevan laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
- b) Andal informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- c) Dapat dibandingkan informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

¹⁰ Ratmono, Dwi, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*, 2015 hlm13

¹¹ Tanjung, Abdul Hafis. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Bandung: Alfabet. (2012) h14

- d) Dapat dipahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Basis Akuntansi Pemerintahan

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi ini berhubungan dengan waktu kapan pengukuran dilakukan. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual. Namun terdapat modifikasi dari keduanya, yaitu basis kas dan basis akrual sama-sama digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

- a) Basis Akuntansi Kas (*Cash Basis of Accounting*) basis akuntansi kas murni dimana pendapatan hanya diakui pada saat kas diterima dan beban hanya diakui pada saat kas dibayarkan. Pada praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis kas digunakan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah¹².
- b) Basis Akuntansi Akrual (*Accrual Basis of Accounting*) basis akuntansi akrual dimana pendapatan diakui pada saat dihasilkan dan beban diakui pada periode terjadinya, tanpa memperhatikan waktu penerimaan atau pembayaran kas. Pada praktik akuntansi pemerintahan di Indonesia, basis akrual digunakan untuk menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Aset diakui saat telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sedangkan kewajiban diakui saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul.

Akuntansi Menurut Perspektif Islam

Dalam buku “Akuntansi Islam”, akuntansi menggunakan kata muhasabah. Seperti Husin Syiahatah yang bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul “Pokok-pokok Akuntansi Islam” yang ternyata judul aslinya adalah “Usiul Ali-Fiikr Ail-Muihasabi Ail-Isilami. Selain kata hisaba, kata tersebut digunakan oleh para ahli untuk merujuk pada akuntansi adalah ayat yang menggunakan kata kaitaba¹³. Sebagai mana dalam QS. Al-Baqarah 282¹⁴:

¹² Kieso, Donald E. Dkk. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Keduabelas, Jilid 1 . Terjemahan oleh Emil Salim. 2008. Jakarta: Penerbit Erlangga

¹³ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Tela'ah atas Simpul-Simpul Ekonomi dan Bisnis Dalam Alqur'an*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 216

¹⁴ Q.S. Al-Baqarah : 282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
وَإِنْ تَفَعَلُوا فَاِنَّهُ مُسَوِّغٌ بِكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi di antara orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwailah kepada Allah; Allah mengajarkanmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Prinsip Akuntansi dalam ayat ini menunjukkan bahwa praktik akuntansi telah digunakan oleh Islam jauh mendahului perkembangan ilmu akuntansi yang saat ini diklaim berasal dari ilmuwan Barat. Beberapa konsep akuntansi yang terdapat dalam ayat ini adalah:

- a) Mencatat Transaksi: Ayat di atas sekurang-kurangnya terdapat tujuh kata yang menyinggung asal kata “kai-tia-bia” yang diartikan menulis atau mencatat. Dan ada pun salah satu hikmah akuntansi adalah mencatat semua transaksi, apakah termasuk dalam kategori aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan.
- b) Periode atau Waktu Akuntansi: Ayat di atas juga menyinggung tentang waktu, dimana dari Akuntansi juga terdapat konsep waktu ialah seluruh transaksi wajib jelas tanggal transaksinya. Bersamaan dengan itu terdapat juga yang dinamakan periode laporan keuangan yaitu per 31 Desember setiap tahunnya, atau kerap disebut sebagai tutup buku.
- c) Ketika dilakukannya transaksi hutang-piutang antara orang yang lemah akal nya atau belum baligh hendaklah ada seorang saksi yang ditunjuk untuk menjadi saksi/penulis dalam transaksi tersebut.

Hipotesis

Hipotesis 1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Hipotesis 2: Penerapan SAP berbasis akrual di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan, yang ditunjukkan oleh peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik.

3. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

Populasi dan Sampel

- a) Populasi penelitian adalah seluruh pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis yang terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan.
- b) Sampel penelitian diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu dengan memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Sampel penelitian ini terdiri dari 5 orang pegawai yang dipilih berdasarkan kriteria tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi, melibatkan pengamatan langsung terhadap proses penyusunan laporan keuangan di Badan Pendapatan Daerah.
- b) Wawancara, dilakukan dengan para pegawai dan manajer yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan laporan keuangan.
- c) Analisis dokumen, meliputi pengumpulan dan analisis dokumen terkait dengan penyusunan laporan keuangan, seperti laporan keuangan, pedoman akuntansi, kebijakan, dan dokumen lain yang relevan.

Teknik Analisis Data

- a) Analisis deskriptif, digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang data yang dikumpulkan.

- b) Analisis kualitatif, digunakan untuk menganalisis data kualitatif, seperti hasil wawancara atau catatan observasi, untuk mengidentifikasi pola, tema, atau tantangan dalam penerapan SAP.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis menunjukkan komitmen untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi pada Laporan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Laporan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dirancang untuk mencerminkan seluruh aktivitas keuangan yang terjadi selama periode pelaporan yang bersangkutan. Dengan demikian, laporan keuangan tersebut memberikan gambaran yang komprehensif dan transparan mengenai kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis serta memenuhi persyaratan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

1. Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis memengaruhi transparansi dalam penyusunan laporan keuangan?

Berdasarkan pendapat Bapak Fadil Agus, Ibu Irna Sartika, Ibu Deska Putri, Bapak Jeni Hadinata, dan Bapak Wira Putra Nanda, penerapan standar akuntansi pemerintah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki dampak signifikan terhadap transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Dampak tersebut meliputi:

- a) Kepatuhan terhadap regulasi
- b) Konsistensi dan keterbandingan
- c) Pengungkapan informasi yang memadai
- d) Akuntabilitas
- e) Pemeriksaan dan audit yang lebih efektif
- f) Perencanaan dan penganggaran yang lebih baik
- g) Transparansi public
- h) Peningkatan kepercayaan public

2. Apa saja prinsip akuntansi pemerintah yang harus dipatuhi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menyusun laporan keuangan?

Berdasarkan pendapat Bapak Fadil Agus, Ibu Irna Sartika, Ibu Deska Putri, Bapak Jeni Hadinata, dan Bapak Wira Putra Nanda, prinsip akuntansi pemerintah yang harus dipatuhi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam menyusun laporan keuangan meliputi:

- a) Basis akrual
- b) Basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja
- c) Konsistensi
- d) Relevansi
- e) Dapat dipahami
- f) Keandalan
- g) Komparabilitas
- h) Pengungkapan lengkap
- i) Entitas akuntansi dan pelaporan
- j) Kontinuitas
- k) Substansi mengungguli bentuk formal

- l) Materialitas
- m) Penilaian dan pengukuran
- n) Prudensial (Kehati-hatian)

3. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis memastikan pemisahan dana publik dan dana pribadi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah?

Berdasarkan pendapat Bapak Fadli agus, Ibu Irna Sartika, Ibu Deska Putri, Bapak Jeni Hadinata, dan Bapak Wira Putra Nanda, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis mungkin menghadapi berbagai hambatan dan tantangan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk menyusun laporan keuangan operasional. Beberapa hambatan dan tantangan utama yang mungkin dihadapi termasuk:

- a) Keterbatasan sumber daya manusia
- b) Kompleksitas Standar Akuntansi
- c) Sistem Informasi dan Teknologi yang Tidak Memadai
- d) Kendala Peraturan dan Regulasi
- e) Transparansi dan Akuntabilitas
- f) Pelaporan yang Tepat Waktu
- g) Kualitas Data
- h) Koordinasi Antar Lembaga
- i) Sosialisasi dan Pelatihan
- j) Perubahan Kebijakan dan Reformasi
- k) Audit dan Pengawasan

4. Bagaimana evaluasi terhadap sistem pengendalian internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam konteks penerapan standar akuntansi pemerintah?

Berdasarkan pendapat Bapak Fadil Agus, Ibu Irna Sartika, Ibu Deska Putri, Bapak Jeni Hadinata, dan Bapak Wira Putra Nanda, evaluasi terhadap sistem pengendalian internal (SPI) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam konteks penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan akurat, andal, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi SPI tersebut meliputi:

- a) Struktur Organisasi
- b) Lingkungan Pengendalian
- c) Penilaian Risiko
- d) Kegiatan Pengendalian
- e) Informasi dan Komunikasi
- f) Pemantauan dan Evaluasi
- g) Kepatuhan terhadap SAP
- h) Pengelolaan Aset dan Liabilitas
- i) Kualitas dan Integritas Data
- j) Respons Terhadap Temuan Audit

5. Bagaimana laporan keuangan yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah?

Berdasarkan pendapat Bapak Fadli Agus, Ibu Irna Sartika, Ibu Deska Putri, Bapak Jeni Hadinata, dan Bapak Wira Putra Nanda, laporan keuangan yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dapat mencerminkan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui beberapa cara yang mencakup struktur, isi, dan proses pelaporan. Beberapa aspek utama yang menunjukkan kepatuhan terhadap SAP meliputi:

- a) Penyajian Laporan Keuangan yang Komprehensif

- b) Kepatuhan terhadap Prinsip Akuntansi Berbasis Akrua
- c) Pengungkapan yang Memadai
- d) Konsistensi dan Komparabilitas
- e) Keandalan dan Validitas Data Keuangan
- f) Pelaporan yang Tepat Waktu
- g) Transparansi dan Akuntabilitas

Pembahasan

Analisis penerapan standar akuntansi pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis mematuhi dan menerapkan standar akuntansi pemerintah yang berlaku dalam proses penyusunan laporan keuangannya. Proses ini melibatkan pengukuran, pengungkapan, dan pelaporan informasi keuangan yang akurat dan transparan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Dalam analisis tersebut, ada beberapa aspek yang mungkin dieksplorasi, termasuk:

- a) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah meliputi pengukuran aset, kewajiban, pendapatan, dan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b) Transparansi dan Keterbacaan Laporan Keuangan, transparansi menggambarkan sejauh mana laporan keuangan memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan akurat mengenai kondisi keuangan dan kinerja organisasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah berkomitmen untuk menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangannya, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Transparansi: Penerapan SAP di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah meningkatkan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini terlihat dari kepatuhan terhadap regulasi, konsistensi dan keterbandingan data, pengungkapan informasi yang memadai, akuntabilitas, pemeriksaan dan audit yang efektif, serta perencanaan dan penganggaran yang lebih baik.

Prinsip Akuntansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi pemerintah yang tercantum dalam SAP, seperti basis akrual, basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja, konsistensi, relevansi, dapat dipahami, keandalan, dan komparabilitas.

Pemisahan dana terdapat beberapa kendala yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam memisahkan dana publik dan dana pribadi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas standar akuntansi, sistem informasi dan teknologi yang tidak memadai, serta kendala peraturan dan regulasi.

Sistem pengendalian internal di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini terlihat dari adanya pemantauan terhadap laporan keuangan, komunikasi dan informasi yang baik, kegiatan pengendalian yang terstruktur, dan pemisahan tugas yang jelas.

Kepatuhan terhadap standar laporan keuangan yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis mencerminkan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah. Hal ini terlihat dari pengakuan dan pengukuran yang tepat, penyajian yang sesuai dengan SAP, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi pemerintah, pengungkapan yang memadai, audit

dan review internal, pengelolaan dan pengawasan yang efektif, serta pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SAP di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik.

Saran

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan kualitas data dan sistem informasi keuangan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan efisien. Melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi staf dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi pemerintah. Memperkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan keuangan.

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi tantangan spesifik dan solusi inovatif dalam penerapan standar akuntansi pemerintah di Badan Pendapatan Daerah. Mengkaji potensi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Mengembangkan model dan strategi yang lebih efektif untuk membangun budaya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

Daftar Pustaka

- Al Qur'an dan Terjemahannya*, Mubarakatoyyibah, Kudus, 1998.
- Amelia Ahmad dan Sulaiman, "Analisis Penerapan Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ende", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, 2018, pp. 1-15.
- Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Tela'ah atas Simpul-Simpul Ekonomi dan Bisnis Dalam Alqur'an*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 216
- Heitner, Heather. "Accrual Accounting: What It Is and How It Works." Investopedia, 11 Jan. 2023, www.investopedia.com/terms/a/accrualaccounting.asp.
- Kieso, Donald E. Dkk. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Keduabelas, Jilid 1 . Terjemahan oleh Emil Salim. 2008. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Munawir S. 2004. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Keempat, Cetakan Kesebelas. Yogyakarta : Penerbit Liberty hlm13
- Nordiawan, Deddi, dkk. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat. 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Ratmono, Dwi, *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*, 2015 hlm13
- Sinta Putri Utami, "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Sebagai Badan Layanan Umum Daerah," (Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2019)
- Tanjung, Abdul Hafis. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Bandung: Alfabet. (2012) h14
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Wastam Wahyu Hidayat, *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018)